BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap tahunnya baik dari segi pembangunan maupun segi kepadatan penduduk. Pertumbuhan dan perkembangan yang semakin padat akan berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup yang menurun. Berbicara mengenai lingkungan hidup, Indonesia menempati urutan ke delapan dari sepuluh negara penyumbang gas emisi rumah kaca terbanyak, dengan sumber emisi tertinggi adalah karbondioksida (CO₂) yang didominasi berasal dari sektor energi dan transportasi.¹ Untuk itu pemerintah melakukan upaya mitigasi terhadap permasalahan tersebut dengan cara menerapkan konsep Kota Hijau (*Green City*) sebagai bagian dari pembangunan dengan mengadakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan Perkotaan sebagai kawasan yang padat dalam sektor energi dan transportasi.² Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum merumuskan konsep kota hijau di Indonesia dengan penyelenggaraan kebijakan P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) sebagai instrumen pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang).³ Langkah ini

¹ Cri Wahyuni Brahmi Yanti, 2022, *Strategi Pengelolaan Lanskap Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, hlm 1.

² Ayu Candra Kurniati, 2021, "Kategorisasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 19, Sekolah Pascasarjana UNDIP, hlm. 128.

³ Cri Wahyuni Brahmi Yanti, *Op. Cit*, hlm 1.

menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi ekologis agar terhindar dari kerusakan berlanjut dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap keseimbangan lingkungan dengan mengimplementasikannya berdasarkan UU Penataan Ruang, sesuai dalam Pasal 3 yang menentukan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Selain itu UU tersebut juga memberikan penegasan bahwa keseimbangan lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam penetapan dan implementasi kebijakan pembangunan.⁴

Ruang terbuka hijau merupakan salah satu bentuk dari penataan ruang dalam rangka pembenahan lingkungan hidup di suatu kawasan. Pasal 1 angka 31 UU Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Singkatnya, ruang terbuka hijau merupakan ruang atau kawasan terbuka di suatu wilayah yang ditanami pohon maupun tanaman. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau terbagi menjadi ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Ruang terbuka hijau privat dimiliki dan dikelola oleh individu/instansi di luar pemerintah daerah yang berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami

⁴ Reda Rizal, 2016, *Studi Kelayaka Lingkungan*, LPPM UPN Veteran Jakarta, Jakarta, hlm. 1.

tumbuhan. Sementara itu, ruang terbuka hijau publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota serta digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang dapat berbentuk taman kota, taman pemakaman umum, serta jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Eksistensi ruang terbuka hijau sangat penting bagi suatu wilayah khususnya di kawasan perkotaan yaitu sebagai pengendali pencemaran udara karena mampu menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, serta mampu menjadi area resapan air untuk mencegah terjadinya banjir.⁵ Dengan demikian, penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan merupakan hal yang esensial dan berperan penting dalam pembangunan infrastruktur hijau dalam rangka menyeimbangkan ekosistem kota dan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan kawasan perkotaan tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan, baik secara nasional, regional, maupun lokal.⁶ Pada dasarnya, keberhasilan pengembangan ruang terbuka hijau tergantung pada keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbuka pada suatu kawasan khususnya perkotaan, sehingga emisi karbon yang dihasilkan dapat diserap lebih banyak oleh luasan ruang terbuka hijau yang tersedia. Pasal 29 ayat (2) UU Penataan Ruang juga mengatur bahwa pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah kota harus mencapai proporsi yang telah ditentukan yaitu sebesar 30% dari total luas wilayah kota, yang

⁵ Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Kehidupan, hlm.1, <https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan>, diakses 25 Oktober 2024.

⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, PenerbitNuansa, Bandung, hlm. 137.

terdiri atas 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau privat.

Salah satu kota di Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan infrastrukturnya adalah kota Yogyakarta. Kepadatan penduduk di kota Yogyakarta yang fluktuatif tiap tahunnya menyebabkan kebutuhan akan fasilitas, sarana prasarana serta lahan untuk pembangunan khususnya pemukiman bertambah dan berdampak adanya alih fungsi lahan dari ruang terbuka menjadi ruang terbangun yang menyebabkan area resapan air berkurang.⁷ Serta menghabiskan lahan pembangunan untuk memaksimalkan ruang bangunan tanpa mempertimbangkan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau. Selain itu, produktifitas masyarakat pada moderen ini memerlukan transportasi di segala aktivitas sehingga pengguna kendaraan bermotor yang meningkat mampu mempengaruhi kualitas udara, karena memicu peningkatan emisi karbon dan konsentrasi polutan yang tinggi.⁸ Sedangkan, kualitas lingkungan hidup di kota Yogyakarta merupakan hal yang fundamental untuk dijaga kelestariannya.⁹ Terbatasnya ruang terbuka dan potensi penurunan pasokan udara bersih, cukup menjadi alasan bagi pemerintah daerah melakukan upaya mitigasi terhadap kerusakan lingkungan yang mengancam Kota Yogyakarta melalui penyediaan ruang

⁷ Hascharia Budi Prasetyo, 2016, *Perubahan Peruntukan Kawasan Dalam Perspektif Penataan Ruang*, Universitas Brawijaya, hlm 6.

⁸ Cri Wahyuni Brahma Yanti, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁹ Novita Suratman, 2020, "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta", *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol 1 No.3/Agustus/2020, Magister Ilmu Pemerintahan UMY, hlm. 103.

terbuka hijau publik sebagai bentuk realisasi penataan ruang kota. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diberikan oleh negara tidak hanya kepada pemerintah pusat, melainkan juga kewenangan pemerintah daerah. Meskipun, pada kenyataannya realisasi dari penyediaan ruang terbuka hijau itu sendiri memiliki permasalahan sebagai hambatannya seperti, lahan yang terbatas dan mematok harga lahan yang sangat tinggi, adanya sistem penguasaan dan pemilikan lahan, okupasi lahan peruntukkan ruang terbuka hijau tanpa ijin, keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan terbatasnya peran serta masyarakat dalam penyediaan dan peningkatan kinerja ruang terbuka hijau publik.¹⁰

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan aturan khusus tentang Ruang Terbuka Hijau Publik sebagai keberlanjutan dari program yang tertuang dalam UU Penataan Ruang melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum. Peraturan ini hadir sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan ruang terbuka hijau publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut. Dijelaskan pula bahwa peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka meminimalisir alih fungsi lahan seiring dengan pesatnya laju

¹⁰ Nirwono Joga, dkk, 2021, *Elaborasi Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH*, Gramedia, Jakarta, hlm. 41

pembangunan, sebagai instrumen acuan dalam mendukung pemenuhan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik Kota Yogyakarta, serta mengoptimalkan pembangunan yang ada agar berwawasan lingkungan dan lahan yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dalam hal ini mengenai ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik, tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik, melainkan juga memerlukan pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau Publik menyebutkan bahwa Badan Lingkungan Hidup yang kemudian berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup merupakan organisasi perangkat daerah yang mengatur tata ruang hijau Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, serta selaku badan yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengawasi program di bidang ruang terbuka hijau publik.¹¹

Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang yang mengatur mengenai proporsi ruang terbuka hijau yaitu sebesar 30% dari total luas wilayah terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Maka, berdasarkan luas wilayah Kota Yogyakarta yang seluas 3.250 ha atau 32,5

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik, hlm 1, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/bidang-ruang-terbuka-hijau-publik>, diakses 31 Oktober 2024.

km², artinya harus memenuhi ruang terbuka hijau minimum seluas 975 ha atau 9.750 m² yang terdiri atas 650 ha atau 6500 m² RTH publik dan 325 ha atau 3.500 m² RTH privat. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku lembaga perencana, pelaksana, dan pengelola Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa presentase luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta berdasarkan data pada tahun 2016 hanya sebesar 18,77% dari total luas wilayah, dengan RTH privat sebesar 12,93% dan RTH publik sebesar 5,83%. Hingga tahun 2020, luas ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta baru mencapai 23% dengan proporsi 15% RTH Privat dan 8% RTH Publik. Artinya, jumlah RTH Privat sebenarnya telah melewati batas minimum. Sementara, permasalahannya adalah pada RTH Publik yang masih jauh dari target.¹² Melalui data di atas, kebijakan pemerintah dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum yang perencanaan serta pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum menunjukkan hasil maksimal. Sehingga perlu adanya evaluasi agar tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan permasalahan tersebut karena Penulis ingin mengetahui faktor yang menjadi alasan minimnya presentase ketersediaan

¹² Daniel Kalis Jati Mukti, Menyoroti Minimnya Ruang Terbuka Hijau Di Yogyakarta, <https://teraspers.uajy.ac.id/menyoroti-minimnya-ruang-terbuka-hijau-di-kota-yogyakarta/>, diakses 29 Oktober 2024.

ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta. Penulis ingin mengetahui adakah hambatan yang ditemukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan kebijakan ruang terbuka hijau publik berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum?
2. Apa hambatan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum?
3. Apakah Solusi dari hambatan yang dihadapi dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dibuat dalam proposal penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.
3. Untuk mengetahui Solusi dari hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu untuk memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu hukum dan bidang tertentu, khususnya hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur di undang-undang serta dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan mengenai ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan khususnya Kota Yogyakarta sehingga hambatan-hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik dapat teratasi.

b. Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini diharapkan Masyarakat sebagai pendukung pemerintah sadar bahwa pengadaan ruang terbuka hijau publik merupakan sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat di wilayah perkotaan khususnya kota Yogyakarta. Maka dari itu, masyarakat diharapkan mampu menjaga keselarasan ekosistem di wilayah ini.

c. Bagi Penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap penulis sendiri agar dapat menambah wawasan yang lebih

luas mengenai ilmu hukum khususnya di bidang yang berfokus pada ruang terbuka hijau publik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Walikota No 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum” merupakan karya asli penulis dan bukan dari hasil plagiasi penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai pembanding, terdapat tiga Penelitian dengan tema serupa, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ditta dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas mengenai “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta” dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta, Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta. Sehingga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, dan Untuk mengetahui apa saja

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penentu kebijaksanaan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau di daerah serta mengevaluasi atas pelaksanaannya, Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai pelaksana, pembina, dan koordinasi terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau. Penyediaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta dengan cara jual beli tanah, dimana tanah yang dulunya tanah hak milik berubah menjadi Tanah Negara ketika tanah tersebut dibeli oleh Pemerintah Kota. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan lahan, harga lahan yang tinggi di Kota Yogyakarta, belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Yogyakarta, serta Ruang Terbuka Hijau Publik pohon perindang jalan terganggu oleh aktivitas pertokoan, pedagang kaki lima, dan pemasangan iklan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum

sedangkan penelitian di atas mengacu pada aturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Risty Zahrotul Aini dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas mengenai “Implementasi Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Pasal 29 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang” dengan rumusan masalah yaitu Apakah pemerintah kota Yogyakarta sudah mengimplementasikan ketentuan ketersediaan tata ruang terbuka hijau yang diamanatkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga bertujuan untuk menjelaskan implementasi ketersediaan tata ruang terbuka hijau di Yogyakarta di tinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dibuktikan dengan data dari Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kota Yogyakarta bahwa RTH Publik kota Yogyakarta sebesar $\pm 17,16\%$ (357,72 Ha) dari total luas kota Yogyakarta sebesar 3350,01 Ha maka dengan ini RTH Publik memiliki kekurangan $\pm 2,84\%$ (650 Ha). Maka pemerintah kota Yogyakarta membuat kebijakan pengadaan tanah melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ruang

Terbuka Hijau Publik. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum sedangkan penelitian di atas mengacu pada peraturan yang berbeda yaitu Pasal 29 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arista Putri Wijayanti dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang membahas mengenai “Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031” dengan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, dan Apa saja hambatan - hambatan yang terjadi dalam penyediaan RTH di Kota magelang. Sehingga tujuan dari penelitian tersebut adalah Untuk mengetahui Implementasi yang berkaitan dengan proporsi Ruang Terbuka Hijau khususnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, serta untuk mengetahui hambatan.- hambatan dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Magelang berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perencanaan makro, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang sebagai lingkup perencanaan mikro RTRTW, dan pihak pelaksana RTH Publik yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kota Magelang masih berada pada presentasi 16,3% atau dimana idealnya RTH publik sebesar 20% sedangkan untuk RTH privat di presentase 19,11% dimana Kota Magelang sudah mencapai jumlah minimal ideal RTH privat yaitu 10%. Hambatan yang dihadapi dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Magelang adalah adanya keterbatasan lahan atau kurangnya lahan di kawasan perkotaan, serta belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terdapat pada penelitian yang diteliti oleh penulis mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang

Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum sedangkan penelitian di atas mengacu pada peraturan yang berbeda Perda Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 dan di kota yang berbeda yaitu Kota Magelang.

F. Batasan Konsep

1. Penyediaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan berasal dari kata “sedia” dengan ditambahkan imbuhan pe- di awal, -ny- di tengah dan -an di akhir, sehingga dapat diartikan bahwa penyediaan merupakan kegiatan mempersiapkan atau merencanakan sesuatu untuk tersedia.

2. Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTHP berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum, yaitu ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis.

3. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu “Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama Walikota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota.” Pasal 1 angka 4 “Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Yogyakarta.”

4. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi DIY dan satu-satunya daerah tingkat II yang memiliki status kota, sedangkan empat daerah tingkat II lainnya memiliki status kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang relatif sempit, hanya sekitar 32,5 kilometer persegi, atau sekitar 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY. Wilayah ini terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Penduduknya berjumlah sekitar 461.225 jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi.¹³

¹³ Asiva Noor Rachmayani, Gambaran Umum Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, <https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-kota-yogyakarta>, diakses 4 Oktober 2024.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian Empiris ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, data yang Penulis gunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan Ruang terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku dinas yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengawasi program di bidang ruang terbuka hijau publik.

a. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain:

- a) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta
- c) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Pendapat Hukum dari Buku, Jurnal, Hasil Penelitian, dan Artikel
- b) Narasumber
- c) Internet

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini, data yang dipergunakan adalah hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku dinas yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengawasi program di bidang ruang terbuka hijau publik.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari artikel, buku, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau publik.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta

5. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli/professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber penelitian ini adalah Nurharyadi Fajar Hidayat, S.T. M.Ars selaku Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis inidapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁴ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara memaparkan secara rinci terkait fenomena tertentu kemudian hasil pemaparan dianalisis dengan kalimat yang logis dan disistемasikan dengan kajian teori hukum serta hukum positif. Metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses berpikir dari hal hal yang khusus maka ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 137.